

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan peneliti dilapangan tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kota Padang dapat di tarik kesimpulan belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dilandaskan dengan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yang mengakibatkan jalannya kebijakan ini tidak efisien.

Pertama, standar dan sasaran nya sudah jelas, namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik. Kedua, sumber daya manusia yang belum memenuhi dalam segi kuantitasnya. Ketiga, sumber daya finansial yang masih belum mencukupi untuk melaksanakan jalannya program pupuk bersubsidi dimana masih kurangnya anggaran dari Pemerintah Kota Padang dan untuk honor petugas yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Keempat, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Kelima, kurangnya komunikasi sehingga masih adanya implementor yang belum memahami kebijakan terbaru. Keenam, masih kurangnya frekuensi sosialisasi yang dilakukan oleh implementor sehingga target group kurang memahami akan tujuan program pupuk bersubsidi.

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan

implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Padang agar dapat mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat petani. Untuk itu, setelah peneliti menganalisis kebijakan tersebut maka peneliti mengusulkan beberapa saran sebagai berikut :

6.2 Saran

1. Peningkatan Frekuensi Sosialisasi : Dinas Pertanian Kota Padang perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi mengenai kebijakan terbaru terkait Program Pupuk Bersubsidi. Ini penting untuk memastikan bahwa kelompok sasaran benar-benar memahami tujuan dan manfaat dari program ini.
2. Meningkatkan Pengawasan Berkala dan Monitoring : Dinas Pertanian Kota Padang perlu melakukan pengawasan berkala dan monitoring yang lebih intensif terhadap Program Pupuk Bersubsidi, mengingat pupuk merupakan elemen vital dalam produktivitas hasil pertanian.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia : Dinas Pertanian Kota Padang perlu meningkatkan keterampilan Tim Pelaksana Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam memahami dan memperbarui data secara berkala, guna memastikan pupuk berada di tangan yang tepat.
4. Penyediaan Anggaran yang Cukup : Penting bagi Pemerintah Kota Padang, melalui Dinas Pertanian, untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Ini termasuk peningkatan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dan memastikan honorarium petugas cukup untuk menjalankan tugasnya.

5. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Optimal : Dinas Pertanian Kota Padang harus memastikan bahwa SOP yang telah ditetapkan diterapkan dengan baik oleh semua pihak terkait. Ini akan membantu memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan.

6. Peningkatan Komunikasi : Dinas Pertanian Kota Padang perlu meningkatkan komunikasi antara semua pelaksana terkait penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk komunikasi dengan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi yang baik akan membantu memastikan bahwa semua pelaksana memahami kebijakan terbaru dan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif.

